

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Andi Tenri Abeng, *Layanan Pertanahan Elektronik, disampaikan pada acara Kongres Luar Biasa (KLB)*, (Depok: Rapat Kerja Nasional dan UP Gading, 2023)
- Arifin, Zaenal & Adhi Setiyawan, *Pengembangan Pembelajaran Aktid dengan ICT*. (Yogyakarta: Skripta Media Creative, 2012)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Revisi, Cet.8*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, (Semarang: Rasai Media Group, 2008)
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk*, (Massachusetts: Harvard University Press, 2007)
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Philipus M Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)

Ridwan H.R, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Jurnal Internasional/Jurnal Nasional

Noor Atikah, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia”, *Notary Law Journal*, Vol 1, No 3, (2022). DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29> .

Destriana, A., & Allagan, T. M. P. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik”. *Palar (Pakuan Law review)*, Vol 8, No 1, (2022). DOI: 10.33751/palar.v8i1.4590. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68>

Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 4, No 1, (2021). DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68>

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3, (2014). DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>

Rifqi Muntaqo, “Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat”, *Jurnal PPKM I* (2017). DOI: <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i1.401>

- Suhartoyo, S. "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)". *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2, No 1, (2019). DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Tiffany J Monalu, Tommy F Sumakul, and Meiske T Sondakh, "Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Janinan Keamanan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.2, (2023).
- Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "*Optimalisasi Informasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara*", *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.6, (2018).
- Muhammad Chafi Sholeh, "*Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhadap Pengadaan Sertifikat Elektronik di Indonesia*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 (2022)
- Pandam Nurwulan, "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal JH Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 183-202 Kementerian ATR /BPN, newsletter atr-bpn edisi 69 Maret (2021). DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art9>
- Kurnia Rheza Randy Adinegoro, "Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang", *Jurnal Administrasi Publik* Volume 515, No. 1, (2023). DOI: <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Edwin Yoga Pratama, Nabitatus Sa'adah "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik", *Jurnal NOTARIUS*, Volume 16 Nomor 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41661>

Desak Komang Lina Maharani dan I Ketut Westra, “Peran PPAT Dalam Melakukan Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Tanah”, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 02 Agustus (2022). DOI :10.24843/AC.2022.v07.i02.p7

Seminar

Virgo Eresta Jaya, Kapusdatin Pertanahan, Tata Ruang dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, “Sosialisasi Sertipikat Elektronik, Pelayanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Serta Peran Serta PPAT Selaku Pengguna Layanan,” Disampaikan pada Seminar Daring IPPAT Komwil Jawa Barat Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, tata Ruang Dan LP2B Kementerian ATR/BPN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Website/Internet

Tito Edy Priandono, “Transformasi Digital Menuju Era Digital Society Sebagai Akselerasi Kebangkitan Ekonomi Nasional”.

<http://berita.upi.edu/transformasi-digital-menuju-era-digital-society->

[sebagai-akselerasi-kebangkitan-ekonomi-nasional/](#) diakses pada tanggal 6 Desember 2023

BBC News Indonesia, “Sertifikat Tanah Elektronik: Bagaimana Penerapan, Keamanan, dan Sanksi Terhadap yang Menolak?”
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023

Ngobrolin Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> diakses pada tanggal 16 November 2024, Pukul 05.02 WIB
ATR/BPN, Layanan Pertanahan Elektronik yang Mudah, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berstandar Dunia,
<https://www.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/1235/layanan-pertanahan-elektronik-yang-mudah-wujudkan-visi-kementerian-atrbpn-berstandar-dunia> diakses pada 27 Mei 2024

Biro Hubungan Masyarakat, Miliki Peran Penting dalam Pelayanan Pertanahan, Sekjen Kementerian ATR/BPN Imbau PPAT untuk Kerja Secara Profesional dan Berintegritas, <https://kab-jember.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/8026/miliki-peran-penting-dalam-pelayanan-pertanahan-sekjen-kementerian-atrbpn-imbau-ppat-untuk-kerja-secara-profesional-dan-berintegritas#:~:text=Sebab%2C%20PPAT%20merupakan%20mitra%20yang,terhadap%20hampir%2070%25%20layanan%20kita>. Diakses pada 6 Juni 2024

Chandra Hamdani Noor, Kementerian ATR/BPN terbitkan 38.194 sertifikat tanah elektronik, <https://www.antaraneews.com/berita/4083213/kementerian-atr-bpn-terbitkan-38194-sertifikat-tanah-elektronik> diakses pada 27 Mei 2024

